

Penelitian mengenai Optimalisasi Peran dan Tanggungjawab Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Balai Besar POM) Semarang Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Obat Tradisional merupakan penelitian hukum normatif. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan konsumen selaku pengguna produk obat tradisional terhadap produk-produk obat tradisional yang menyimpang dalam produksinya, maupun mengetahui peranan, tanggungjawab dan kewenangan yang dilakukan oleh Badan POM maupun YLKI berkaitan dengan peredaran produk obat tradisional apakah sudah dilaksanakan secara optimal. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan mempergunakan pedoman wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan studi dokumen.

Penelitian dilakukan di Balai Besar POM Semarang dan YLKI Semarang, serta agen/depot obat tradisional di Semarang, dengan pertimbangan bahwa di wilayah Semarang terdapat banyak produsen obat tradisional, serta jumlah konsumennya juga relatif banyak. Subyek penelitian adalah pejabat Balai Besar POM dan YLKI ditentukan secara purposive, sedang subyek penelitian lain yaitu penjual/pedagang obat tradisional maupun konsumen obat tradisional ditentukan secara acak/random didasarkan pada data yang ada, diseleksi, kemudian dianalisis secara kualitatif normatif, selanjutnya disusun dalam laporan penelitian/tesis yang berifat deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen atas produk obat tradisional belum dilaksanakan secara optimal oleh YLKI maupun Balai Besar POM Semarang karena beberapa kendala yang ditemui dilapangan, baik alasan yuridis, teknis maupun sosiologis, sehingga hak-hak konsumen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 belum terlaksana sebagaimana mestinya. Dari hasil penelitian tersebut diharapkan di masa mendatang perlu adanya sanksi yang tegas bagi produsen yang sengaja memproduksi obat tradisional menyimpang dari ketentuan, selain juga dengan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan internal dan eksternal yang terstruktur, sistem alur kerja yang lebih focus, sistem pelayanan informasi konsumen, sistem sertifikasi yang terpadu, dan sistem reward dan punishment yang lebih tegas. Dan yang lebih penting lagi yaitu dengan mengefektifkan pelaksanaan penegakan hukum yang berkaitan dengan permasalahan produk obat tradisional.

**Kata Kunci :** Optimalisasi, YLKI dan Balai Besar POM Semarang, Perlindungan Konsumen, Obat Tradisional.

The research on the Role and Responsibility Optimization of the Indonesian Consumer Protection Board (YLKI) and the Medicine and Food Monitoring Agency (BPOM) Semarang for Consumer Protection against Traditional Medicine Products is juridical and normative in nature. The objectives are to find out the actions that consumers, as traditional medicine users, can take against cheating products, and to know the role, responsibility and authority of the YLKI and BPOM in relation to the distribution of such products, i.e., whether this has been carried out optimally. The data comprise the primary and secondary data of which the former were obtained from a field research using an interview guideline and the latter were from the library research using a documentary study.

The research was conducted in the BPOM and YLKI Semarang as well as in the stores selling traditional medicine in this city by considering that it has many traditional medicine manufacturers and relatively big numbers of consumers. The subjects are the dignitaries from the BPOM and YLKI, and traditional medicine sellers and consumers chosen at random. The data were analysed in a normative qualitative manner, then presented descriptively in a research report (thesis). The research findings show that consumer protection against traditional medicine products has not been optimally carried out by these institutions due to a number of problems encountered in the field, for either juridical, technical, or sociological reasons. Consequently, the consumer's rights have not been properly given as regulated in the article 4 of the Laws no. 8/1999.

The research results recommend that a decisive sanction be given to producers who intentionally cheat the regulation in producing traditional medicine, and the human resource capability be improved through internal and external structured trainings, better office equipment, telecommunication, computer, internet, presentation, library and archive, as well as management information systems – the systems for human resource development, more focused work flow, consumer information service, integrated certification, and clearly defined reward and punishment. More importantly is through effective law enforcement concerning the issues of traditional medicine products.

Keywords : optimization, the YLKI and BPOM Semarang, consumer protection, traditional medicine.